

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis dan teknologi saat ini telah meningkatkan kemungkinan dilakukannya investasi pada badan usaha atau perusahaan yang dijalankan oleh orang lain. Para pemegang saham cukup membeli saham suatu perusahaan dan membiarkan orang lain menjalankan perusahaan tersebut. Biaya agensi adalah suatu konsekuensi dari hal ini. Biaya agensi pada kenyataannya lebih tinggi pada perusahaan yang tidak dimiliki 100% oleh manajer perusahaan (Ang, Cole, & Lin, 2000). Sebagaimana diprediksi oleh Jensen dan Meckling dalam Ang, Cole, & Lin (2000), biaya agensi bertambah seiring dengan penurunan kepemilikan manajerial. Hal ini tentunya sejalan dengan Teori Agensi.

Salah satu hal yang berkaitan erat dengan Biaya Agensi dikaitkan pada kondisi saat ini adalah bisnis. Sebagaimana dapat kita amati, kondisi bisnis suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari politik. Pada Negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan dan peraturan bisnis diatur oleh Negara. Kita mengenal istilah Hukum Bisnis yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya selain yang telah disebutkan.

CEO Box (sebuah perusahaan *start-up*), Aaron Levie, mengatakan bahwa kita berada pada titik dimana bisnis dan politik tidak dapat dipisahkan jika kita ingin tetap kompetitif dan dapat berinovasi untuk masa depan (Taylor, 2017). Kejadian politik telah menjadi variabel kunci dalam menganalisis prospek ekonomi pada beberapa bulan terakhir di tahun 2016, beberapa ekonom mulai berbicara mengenai siklus politik bisnis dan mempelajari bukan hanya kejutan teknologi dan moneter klasik tetapi juga kejutan politik, dan di kemudian hari politik dan ekonomi akan menjadi tidak terpisahkan (Arenas, 2016). Dengan demikian, koneksi politik menjadi salah satu hal penting bagi perusahaan.

Terdapat berbagai alasan mengapa koneksi politik dianggap hal penting bagi dunia bisnis. Eksekutif dan direktur yang terkoneksi secara politik biasanya dianggap lebih berkuasa karena mereka bisa mendapatkan beragam keuntungan dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan politikus (Khan, Mihret, & Muttakin, 2016). Koneksi politik tampak agak penting pada industri yang tunduk pada peraturan pemerintah yang lebih ketat (Ang, Ding, & Thong, 2013). Chasteen (2010) mengungkapkan koneksi politik sebagai dimensi ketiga dan menamainya kepemimpinan pangkat tiga, setelah kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan instrumental. Koneksi politik yang baik dapat mengatasi kelemahan pada dua dimensi lainnya, tetapi

kekurangan koneksi politik dapat mengurangi dua kepemimpinan lainnya meskipun telah diasah dengan baik (Chasteen, 2010).

Berbagai penelitian telah dilakukan dengan hasil yang beranekaragam. Terdapat penelitian yang mendukung manfaat koneksi politik bagi perusahaan meskipun juga terdapat penelitian lainnya yang menunjukkan biaya yang lebih tinggi karna adanya koneksi politik. Argumen ketergantungan sumber daya menunjukkan hubungan politik sebagai salah satu sumber daya bagi perusahaan, sementara argumen kritikus adalah kebijakan dan regulasi pemerintah seringkali menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan meningkatkan biaya transaksi bagi organisasi bisnis (Khan, Mihret, & Muttakin, 2016).

Penelitian yang mendukung manfaat koneksi politik diantaranya dilakukan oleh Faccio (2006), Claessens *et al.* (2008), dan Boubakri *et al.* (2012). Faccio (2006) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan akses mudah terhadap pembiayaan hutang, perpajakan yang rendah, dan pangsa pasar yang lebih luas. Penelitian Claessens *et al.* (2008) menunjukkan adanya nilai dari koneksi politik pada pasar berkembang dimana perusahaan yang berkontribusi terhadap kampanye politik mendapatkan akses yang lebih didahulukan ke pembiayaan bank. Boubakri *et al.* (2012) menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik menikmati biaya modal yang lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak terkoneksi.

Meski demikian, Johnson dan Mitton (2006) dan Fan, Wong, & Zhang (2007) menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian Johnson dan Mitton (2006) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik terkena dampak yang lebih besar selama terjadinya krisis. Sementara itu, Fan, Wong, & Zhang (2007) menemukan bahwa kinerja return saham perusahaan dengan CEO yang memiliki koneksi politik lebih rendah daripada perusahaan yang dijalankan oleh CEO yang tidak memiliki koneksi politik. Perusahaan dengan CEO yang memiliki koneksi politik cenderung akan memiliki dewan direksi yang didominasi oleh birokrat pemerintah yang kurang profesional karena pengalaman profesional yang kurang relevan (Fan, Wong, & Zhang, 2007). Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadikan topik ini menarik untuk diteliti. Meski demikian, berbagai penelitian sebelumnya hanya meneliti efek koneksi politik terhadap kinerja perusahaan.

Khan, Mihret, & Muttakin (2016) berargumen bahwa berbagai penelitian terdahulu hanya mempertimbangkan pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan, tanpa mempertimbangkan peran biaya agensi sebagai variabel intervensi (pemediasi) antara koneksi politik dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Khan, Mihret, & Muttakin (2016) dalam penelitian mereka melakukan pengujian pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi. Mereka juga meneliti pengaruh kualitas audit sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi.

Kualitas audit diuji dengan kriteria auditor Big 4 sebagaimana penelitian sebelumnya menyarankan bahwa auditor Big 4 memberikan kualitas audit yang lebih baik kepada kliennya (Khan, Mihret, & Muttakin, 2016). Penelitian Rumiwati (2016) yang dilakukan di Indonesia terhadap variabel independen koneksi politik dan manajemen laba, variabel pemoderasi kualitas audit, dan variabel dependen penghindaran pajak, juga mengukur kualitas audit dengan kriteria auditor Big 4. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat dibuktikan dapat memperlemah pengaruh koneksi politik dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak perusahaan. Salah satu saran dalam penelitian Rumiwati (2016) adalah penggunaan proksi kualitas audit yang dapat menggunakan proksi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut dan mengingat banyaknya kasus yang mencoreng nama baik auditor Big 4 sepanjang sejarah, penulis merasa penggunaan auditor Big 4 sebagai indikator kualitas audit kurang tepat.

Kondisi-kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. Penelitian akan dilakukan dengan data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 dan 2017.

Adapun hal yang menjadi nilai tambah daripada penelitian ini dibandingkan dengan berbagai penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Sejauh hasil penelusuran penulis, belum ada penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dependen biaya agensi dan variabel pemoderasi kualitas audit dalam satu model penelitian,
- b. Pengukuran variabel kualitas audit yang tidak menggunakan indikator auditor Big 4, tetapi menggunakan akrual diskresioner yang belum pernah dilakukan pada berbagai penelitian sebelumnya,
- c. Penelitian ini masih hangat dan relevan karena periode penelitian 2 tahun terakhir (2016 dan 2017), sejauh hasil penelusuran penulis hingga saat penelitian ini diajukan, belum pernah dicakupi dalam penelitian yang telah ada.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Latar Belakang, bisnis dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, sejarah di Indonesia pada masa Orde Baru telah menunjukkan besarnya hubungan antara politik dengan bisnis. Meski masa kini telah jauh berbeda dengan masa Orde Baru, tetapi hubungan antara politik dengan bisnis masih dapat dirasakan. Dengan demikian, identifikasi masalah yang mendasari penelitian ini dapat dirangkum dalam dua poin sebagai berikut:

- a. Maraknya pengaruh politik terhadap perusahaan, yang di satu sisi dianggap memberikan dampak positif tetapi di sisi lain meningkatkan biaya bagi perusahaan, dan

- b. Ketidakjelasan mengenai efektivitas dari kualitas audit dalam menjalankan fungsinya.

1.3. Pembatasan Masalah

Ketika membahas masalah politik, cakupan yang dibahas dapat menjadi sangat luas. Hal ini karena permasalahan yang timbul dari suatu pengaruh politik bisa terjadi di berbagai sektor yang mempengaruhi perusahaan, misalnya pada sisi regulasi sehingga membatasi izin usaha perusahaan, dari sisi sumber daya manusia sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan, hingga dari berbagai sisi lainnya.

Pada penelitian ini, masalah yang diteliti akan dibatasi pada koneksi politik yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap biaya agensi perusahaan. Suatu perusahaan didefinisikan sebagai terkoneksi secara politik jika paling sedikit satu dari *blockholder* besarnya (siapa pun yang secara langsung atau tidak langsung memiliki hak voting) atau salah satu direktur utamanya adalah seorang menteri atau kepala daerah, atau dekat hubungannya dengan politikus ternama atau partai politik ternama, atau bagian dari parlemen (Faccio, 2006).

Masalah kedua yang dibahas pada bagian Identifikasi Masalah adalah mengenai ketidakjelasan efektivitas dari kualitas audit dalam menjalankan fungsinya. Audit memiliki fungsi yang relatif luas, misalnya untuk memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan bagi investor yang hendak menginvestasikan uangnya di perusahaan, menilai pelaksanaan

pengendalian internal yang memadai di perusahaan, atau sebagai sarana untuk memahami keberlangsungan usaha (*going concern*) suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, pembatasan masalah mengenai ketidakjelasan efektivitas dari kualitas audit akan dibatasi hanya pada peran kualitas audit dalam menjembatani pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi perusahaan.

1.4. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah koneksi politik merupakan prediktor biaya agensi perusahaan?
- b. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi perusahaan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 1. Menguji pengaruh keberadaan koneksi politik terhadap biaya agensi perusahaan.
 2. Menguji keberadaan kualitas audit dalam memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi perusahaan.

b. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam keputusan investasi di perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan turut mempertimbangkan kualitas audit atas perusahaan tersebut.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi perusahaan dengan dimoderasi oleh kualitas audit.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan penelitian yang meneliti pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi dengan variabel pemoderasi kualitas audit yang tidak diprosikan dengan indikator auditor Big 4 dan menggunakan data periode penelitian yang masih relevan setidaknya sampai 6 bulan ke depan sejak penelitian ini dilakukan, yaitu hingga tahun 2018 berakhir.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum tentang fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan definisi konseptual variabel, kaitan antar variabel, tinjauan atas berbagai penelitian terdahulu baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang mendasari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi desain penelitian ini, populasi dan teknik pemilihan sampel, operasionalisasi variabel dan instrumen dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian ini, yang meliputi deskripsi subyek penelitian, deskripsi obyek penelitian, hasil uji asumsi, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Konseptual Variabel/ *Grand Theory*

2.1.1. *Grand Theory*

Grand Theory pada penelitian ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*). Teori Keagenan menjelaskan suatu konsep hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini pemegang saham) adalah pihak yang memberikan kuasanya kepada *agent* (dalam hal ini direksi atau manajemen perusahaan) untuk menjalankan perusahaan atau bisnis dan melakukan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, *principal* dan *agent* memiliki kepentingannya masing-masing, yang seringkali kepentingan tersebut tidak selaras satu sama lain. *Agent* cenderung akan mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingannya meskipun terkadang merugikan *principal*. Sehingga, timbullah konsep biaya keagenan atau biaya agensi, yaitu biaya yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan tersebut.

2.1.2. Variabel Koneksi Politik

Faccio (2006) mendefinisikan koneksi politik dengan mengungkapkan bahwa suatu perusahaan terkoneksi dengan politikus jika satu dari pemegang saham besar perusahaan atau *top officers*-nya adalah (a) seorang anggota dari parlemen, (b) seorang perdana menteri atau kepala

negara, atau (c) berelasi dekat dengan pejabat tingkat atas (*top official*). Pemegang saham besar yang dimaksud adalah siapa saja yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung memiliki kendali atas perusahaan sebesar paling sedikit 10% dari hak voting pemegang saham. Sedangkan *top officers* yang dimaksud adalah *Chief Executive Officer* (CEO), presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris perusahaan. Lebih lanjut, Faccio (2006) mengungkapkan bahwa frasa berelasi dekat sedikit lebih ambigu dan kurang memiliki definisi yang objektif. Oleh karena itu, Faccio (2006) membuat kategori terpisah atas koneksi jenis ini dan menambahkan keterjadian koneksi ini jika pemegang saham besar perusahaan atau *top officers*-nya merupakan teman dari perdana menteri, merupakan politikus di negara lain, atau diketahui berasosiasi dengan partai politik.

Gomez dan Jomo (2009) dalam Pranoto dan Widagdo (2016) turut mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Lebih lanjut, Pranoto dan Widagdo (2016) menambahkan bahwa perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian, definisi konseptual variabel koneksi politik dapat dimaknai sebagai suatu kedekatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah.

2.1.3. Variabel Biaya Agensi

Teori Agensi adalah hal yang mendasari pengakuan atas adanya biaya agensi. Teori Agensi mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik modal atau pemegang saham sebagai *principal* dan direksi atau manajemen sebagai *agent*. Di satu sisi, pemilik modal sebagai *principal* akan termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Ia berharap untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi modal yang dilakukannya. Di sisi lain, direksi sebagai *agent* akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, misalnya mengejar target laba demi mendapatkan bonus.

Konflik kepentingan ini semakin intens terutama karena kondisi dimana *principal* tidak dapat memonitor aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh *agent*. *Principal* tidak dapat meyakini bahwa *agent* melakukan sesuatu atau bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. Berkaitan dengan konflik kepentingan ini, timbullah konsep biaya agensi, yaitu biaya atau risiko yang timbul karena adanya aktivitas dimana *principal* memberikan kewenangan dan membayar *agent* untuk menjalankan suatu tugas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya agensi hanya timbul manakala *principal* dan *agent* adalah dua pihak yang berbeda yang memiliki tujuan pribadi atau kepentingan yang berbeda. Pada perusahaan

privat yang sahamnya tidak diperjualbelikan di publik, umumnya pemilik modal mengelola sendiri bisnis mereka sehingga tidak timbul konflik keagenan dan tidak ada biaya agensi. Biaya agensi muncul atau dapat diamati pada perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di publik sehingga dapat dipahami bahwa ketika saham perusahaan tidak dimiliki seluruhnya oleh manajemen, timbullah biaya agensi.

Biaya agensi adalah variabel yang telah diteliti di berbagai literatur penelitian. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian Ang, Cole, & Lin (2000) yang menggunakan biaya agensi sebagai variabel dependen dalam penelitian mereka. Biaya agensi diukur secara matematis melalui informasi yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menghitung rasio pemanfaatan aset dan rasio biaya. Rasio pemanfaatan aset menggambarkan efisiensi penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba (Ang, Cole, & Lin, 2000) sedangkan rasio biaya menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengontrol biaya operasional perusahaan.

2.1.4. Variabel Kualitas Audit

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas gabungan yang dinilai pasar bahwa auditor yang ditunjuk akan menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981 dalam Elshafie & Nyadroh, 2014). Sementara itu, PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) mendefinisikan

kegagalan audit sebagai kekurangan signifikansi sehingga perusahaan, pada saat menerbitkan laporan auditnya, gagal memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit atas laporan keuangan dan/atau atas efektivitas pengendalian internal (Franzel, 2013). Dari kedua definisi tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa karakteristik dari suatu audit yang berkualitas tinggi adalah mengeluarkan pendapat yang tepat oleh auditor yang independen yang mengikuti standar audit.

Berbagai penelitian sebelumnya menggunakan indikator auditor Big 4 dan Non Big 4 sebagai proksi kualitas audit. Auditor Big 4 dianggap memberikan kualitas audit yang lebih tinggi daripada Auditor Non Big 4. Namun demikian, berbagai kasus kecurangan akuntansi yang melibatkan auditor Big 4 menimbulkan keraguan apakah benar jasa audit yang diberikan auditor Big 4 lebih berkualitas dan dapat dianggap sebagai proksi kualitas audit. Karena kualitas auditor bersifat multidimensi dan secara tetap tidak dapat diamati, tidak ada suatu karakteristik auditor yang dapat digunakan untuk memproksikannya (Balsam, Krishnan, & Yang, 2003).

Elshafie & Nyadroh (2014) meneliti penggunaan akrual diskresioner (*discretionary accruals*) sebagai pengukur kualitas audit. Penelitian Elshafie & Nyadroh (2014) menunjukkan adanya asosiasi positif antara akrual diskresioner dengan ukuran kualitas audit yang diukur dengan kemungkinan terjadinya penyajian kembali (*restatement*) dan laporan internal kontrol yang negatif. Terdapat hubungan positif antara tingkat

akrual diskresioner dengan penyajian kembali laporan keuangan perusahaan. Selain itu, akrual diskresioner cenderung lebih rendah pada perusahaan setelah menerima laporan internal kontrol yang negatif, mengindikasikan tingkat independensi auditor yang tinggi (Elshafie & Nyadroh, 2014).

2.1.5. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol, diantaranya kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, tahun, dan industri perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan perusahaan oleh manajemen. Adanya kepemilikan manajerial dinilai akan menurunkan biaya agensi yang terjadi karena terjadi keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemegang saham. Semakin tinggi persentase kepemilikan managerial akan dapat mengatasi konflik keagenan dan menurunkan biaya agensi.

Independensi dewan komisaris menggambarkan proporsi komisaris independen pada dewan komisaris. Komisaris independen ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengawasi kinerja manajemen. Semakin independen dewan komisaris yang ada, diharapkan dapat menurunkan biaya agensi yang ada.

Ukuran perusahaan merupakan logaritma natural dari total aset. Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol karena pada

umumnya, perusahaan yang lebih besar akan memiliki biaya operasional yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil.

Leverage adalah rasio total hutang terhadap total aset. Semakin tinggi penggunaan hutang akan menciptakan komitmen tetap dari manajemen untuk membayar hutang. Selain itu, kreditur dapat mengawasi kinerja perusahaan dan secara tidak langsung hal ini menurunkan biaya agensi (Ang, Cole, & Lin, 2000). Dengan demikian, leverage dimasukkan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data perusahaan-perusahaan pada beberapa tahun sehingga terdapat potensi kejadian pada tahun-tahun tertentu mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang berada pada berbagai industri yang berbeda, yaitu dari industri pertanian, industri pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, industri properti, industri infrastruktur, dan industri perdagangan, jasa & investasi. Karakteristik industri yang berbeda berpotensi mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memasukkan variabel tahun dan industri perusahaan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

2.2. Kaitan Antar Variabel

2.2.1. Kaitan Koneksi Politik dan Biaya Agensi

Penelitian Choy *et al.* (2011) dan Boubakri *et al.* (2012) dalam Khan, Mihret, & Muttakin (2016) menunjukkan bahwa lingkungan hukum dan institusional pada tingkat negara dimana suatu perusahaan beroperasi dapat mempengaruhi biaya agensi. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan hasil yang kontradiktif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di negara berkembang yaitu Malaysia oleh Bliss and Gul (2012) dalam Khan, Mihret, & Muttakin (2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung mendapatkan bunga pinjaman yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian Bliss dan Gul (2012), penelitian Khan, Mihret, & Muttakin (2016) dilakukan di Bangladesh yang juga merupakan negara berkembang menunjukkan hasil yang serupa. Perusahaan yang memiliki koneksi politik menunjukkan biaya agensi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Hal ini menjadi wajar karena politik biasanya melibatkan korupsi dan suap. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan lebih banyak terlibat suap untuk membangun koneksi politik dan mendapatkan manfaat dari koneksi politik tersebut. Hal ini tentunya merugikan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas yang tidak bisa menentukan arah perusahaan. Manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang merugikan perusahaan tetapi menguntungkan dirinya sendiri.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan sistem pemerintahan Republik, sama seperti Bangladesh. Oleh karena itu, sejalan dengan penelitian Khan, Mihret, & Muttakin (2016) yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal Bangladesh dalam kurun waktu 2005 hingga 2013, penulis berhipotesis bahwa koneksi politik merupakan prediktor yang positif terhadap biaya agensi perusahaan.

2.2.2. Kaitan Kualitas Audit sebagai pemoderasi pengaruh Koneksi Politik dan Biaya Agensi

Penelitian DeAngelo (1981) dalam Khan, Mihret, & Muttakin (2016) menunjukkan bahwa auditor Big 4 memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Khan, Mihret, & Muttakin (2016) dalam penelitian mereka menguji pengaruh kualitas audit pada pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi dengan menciptakan interaksi antara koneksi politik dan variabel kualitas audit. Mereka meneliti apakah auditor Big 4 di Bangladesh memainkan peran sebagai pemoderasi atau pelengkap dalam pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya peran tersebut, bahwa Auditor Big 4 di Bangladesh dapat memitigasi masalah keagenan karena menjalankan peran pengawasan eksternal yang lebih besar dibandingkan perusahaan audit yang lebih kecil dalam penyediaan jasa audit terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Dengan demikian, sejalan dengan penelitian Khan, Mihret, & Muttakin (2016), penulis berhipotesis bahwa kualitas audit dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi, dimana kehadiran kualitas audit dapat menurunkan pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi.

2.3. Penelitian terdahulu

Berbagai penelitian mengenai koneksi politik telah banyak dilakukan dan dipublikasikan baik secara internasional maupun nasional. Penelitian mengenai koneksi politik pun telah dilakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dua tabel pada halaman selanjutnya merupakan ringkasan berbagai penelitian terdahulu. Tabel pertama merupakan berbagai penelitian internasional mengenai koneksi politik dan tabel kedua merupakan berbagai penelitian di Indonesia.

BERBAGAI PENELITIAN INTERNASIONAL MENGENAI KONEKSI POLITIK:

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
1	<p><i>Corporate political connections, agency costs and audit quality</i></p> <p>Oleh: Arifur Khan, Dessalegn Getie Mihret and Mohammad Badrul Muttakin</p> <p><i>Department of Accounting, Deakin University, Melbourne, Australia</i></p> <p>Diterima tanggal 29 Mei 2016</p> <p><i>International Journal of Accounting & Information Management</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik: bernilai 1 jika terdapat koneksi politik, bernilai 0 jika tidak terdapat koneksi politik.</p> <p>Variabel dependen: Biaya agensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio Pemanfaatan Aset/ <i>Asset Utilisation Ratio</i> (Penjualan setahun : Total aset) 2) Interaksi Tobin's Q dan Free cash flow 3) Rasio Biaya/ <i>Expense Ratio</i> (Biaya operasional : Penjualan setahun) <p>Variabel pemoderasi: Kualitas audit: Berkualitas jika diaudit oleh auditor <i>Big 4</i>.</p> <p>Variabel kontrol: kepemilikan direksi, independensi dewan, usia perusahaan, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, pertumbuhan, penghasilan dividen, volatilitas penghasilan 3 tahun terakhir, tahun, industri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang memiliki koneksi politik memperlihatkan biaya agensi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak; dan • Kualitas audit memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi dalam memitigasi konflik keagenan pada setting ekonomi berkembang. 	<p>Sampel: Perusahaan non-keuangan terbuka di Bangladesh: 155 perusahaan, 968 observasi (tahun 2005-2013).</p> <p>Teknik analisis: Regresi <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
2	<p><i>Political Connection and Firm Value</i></p> <p>Oleh: James S. Ang, David K. Ding, and Tiong Yang Thong</p> <p><i>Asian Development Review 2013</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik: rasio antara direksi yang terkoneksi politik dengan total anggota dewan</p> <p>Variabel dependen: Nilai perusahaan: Tobin's Q</p> <p>Variabel kontrol: Dualitas, Independensi, rata-rata usia direksi perusahaan, <i>Underpricing</i>, <i>Leverage</i>, <i>Return on Assets</i>, <i>Exchange</i>, perusahaan yang berkoneksi dengan pemerintahan, <i>Market Value</i>.</p> <p>H₁: Tanpa korupsi politik, koneksi politik yang dimiliki perusahaan berdampak kecil bahkan tidak berdampak pada nilai perusahaan. Value = a + b1.X + Variabel kontrol + e.</p> <p>H₂: Adanya koneksi politik pada perusahaan yang beroperasi di industri yang diregulasi dengan ketat berasosiasi dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi politik umumnya memberikan nilai tambah yang sedikit kepada perusahaan, tetapi pada industri yang lebih ketat regulasi pemerintahnya, koneksi politik tampak menjadi penting. 	<p>Sampel: 387 perusahaan terbuka di Singapore (lingkungan dimana koneksi politik rendah karena institusi yang lebih baik dan tidak dikacaukan oleh faktor social/budaya yang favourable.</p> <p>Teknik analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis univariate dengan regresi linier <ul style="list-style-type: none"> - Independent t-tests - Wilcoxon signed ranks tests 2) Analisis multivariate: Regresi OLS

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
3	<p><i>Politically connected firms</i></p> <p>Oleh: Mara Faccio</p> <p><i>The American Economic Review, 2006</i></p>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi yang dapat dirasakan/ <i>Perceived corruption</i>, 2. Lingkungan regulator/ <i>Regulatory environment</i>, 3. Kualitas lingkungan hukum/ <i>Quality of legal environment</i>, 4. Keterbukaan/ <i>Openness – cross border restrictions</i>, 5. Demokrasi/ <i>Democracy</i>, Kebebasan Pers. <i>Freedom of Press</i>, Pendidikan/ <i>Education</i>, dan Pengembangan Ekonomik/ <i>Economic Development</i>. <p>Variabel dependen: Koneksi politik: % perusahaan yang terkoneksi dengan menteri atau perdana menteri, jika salah satu dari pemegang saham besarnya (memiliki suara > 10%) atau top officers merupakan anggota parlemen, perdana menteri, atau berelasi secara dekat dengan politikus atau partai.</p> <p>Variabel kontrol: natural log dari produk domestik bruto per kapita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi politik lebih lazim pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, tingkat pembatasan terhadap investasi asing oleh penduduk mereka, dan negara dengan sistem yang lebih transparan. • Tidak ada nilai tambah pada perusahaan yang menunjuk politikus sebagai anggota dewannya karena pada ekuilibrium, biaya dari suatu koneksi politik meng-offset manfaatnya. • Nilai perusahaan meningkat lebih besar ketika seorang pebisnis terpilih menjadi perdana menteri dibandingkan terpilih sebagai anggota parlemen. 	<p>Sampel: 20,202 perusahaan terbuka di 47 negara.</p> <p>Teknik analisis: Regresi yang berdasarkan pada <i>two-boundary Tobit specification</i>.</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
4	<p><i>Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions</i></p> <p>Oleh: Stijn Claessens, Erik Feijen, and Luc Laeven</p> <p><i>Journal of Financial Economics, 2007</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik (diukur dengan pembiayaan terhadap kampanye politik)</p> <p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengembalian saham/ return saham 2. Akses terhadap <i>banking finance</i> <p>H₁: Perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih tinggi akan memiliki return pasar yang lebih secara signifikan tinggi seiring pengumuman hasil eleksi.</p> <p>H₂: Perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih tinggi akan menerima akses pembiayaan bank yang lebih besar selama 4 tahun sejak eleksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan dengan koneksi politik lebih tinggi (kontribusi terhadap kampanye lebih besar) berasosiasi dengan return saham yang lebih besar pada saat pengumuman hasil eleksi. • <i>Leverage</i> bank dari perusahaan yang berkoneksi politik meningkat signifikan selama 4 tahun sejak eleksi, sehingga dapat dikatakan memiliki akses yang lebih besar terhadap pembiayaan bank. 	<p>Sampel: 540 perusahaan terbuka di Brazil</p> <p>Teknik analisis: Regresi OLS</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
5	<p><i>Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence</i></p> <p>Oleh: Mark A. Bliss and Ferdinand A. Gul</p> <p><i>Journal of Banking & Finance, 2012</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik (1 jika terkoneksi secara politik sesuai dengan Faccio (2006), dan 0 jika tidak)</p> <p>Variabel dependen: Biaya bunga</p> <p>Variable kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun lama perusahaan berdiri (AGE) 2. Apakah diaudit oleh auditor besar (AUDITOR) 3. <i>Leverage</i> (LEV) 4. <i>Cash-flow</i> (CF) 5. Total aset (SIZE) 6. <i>Property, Plant and Equipment</i> (PPE) 7. <i>Sales growth</i> (GROWTH) 8. <i>Negative Equity</i> (NEGEQ) 9. <i>Current ratio</i> (CR) 10. <i>Loss</i> (LOSS) <p>H₁: Perusahaan dengan koneksi politik akan berasosiasi dengan biaya bunga yang lebih tinggi H₂: Terdapat asosiasi positif antara biaya bunga dengan koneksi politik dan dualitas CEO (jika CEO merangkap ketua dewan). H₃: Terdapat asosiasi negatif antara biaya bunga dengan koneksi politik dan proporsi komisaris independen pada komite audit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • H₁: Signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa adanya koneksi politik dipersepsikan lebih berisiko. • H₂: Signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa adanya koneksi politik dan dualitas CEO dipersepsikan sebagai risiko yang lebih tinggi • H₃: Signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa adanya koneksi politik dan proporsi komisaris independen yang lebih besar dipersepsikan sebagai risiko yang lebih rendah. • Variabel dependen positif dan signifikan terhadap variabel kontrol LEV, NEGEQ, dan LOSS, dan Negatif dan signifikan terhadap AGE, PPE, GROWTH, dan CR. 	<p>Sampel: top 500 perusahaan terbuka Malaysia selain sekyor keuangan tahun 2001-2004.</p> <p>Teknik analisis: Model regresi</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
6	<p><i>Political connections and the cost of equity capital</i></p> <p>Oleh: Narjess Boubakri, Omrane Guedhami, Dev Mishra and Walid Saffar</p> <p><i>Journal of Corporate Finance, 2012</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik</p> <p>Variabel dependen: <i>Cost of equity capital</i> (biaya ekuitas)</p> <p>Variabel kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volatilitas pengembalian saham 12 bulan terakhir (VARIANCE) 2. <i>Book-to-market value of equity</i> (BTM) 3. Rasio <i>long-term debt</i> dan total asset (LEVERAGE) 4. <i>Natural log</i> dari total aset (SIZE) 5. Dispersi dari ramalan analis (DISPERSI) 6. <i>Cross-Listing in U.S.</i> (CROSS) 7. <i>Stock market total value to GDP</i> (LIQUIDITY) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang terkoneksi secara politik memiliki biaya ekuitas yang lebih rendah. • Biaya ekuitas lebih rendah di perusahaan yang: <ul style="list-style-type: none"> ○ lebih besar dan lebih tua, dan ○ berlokasi di Negara dengan kebebasan pers dan demokrasi yang lebih rendah, korupsi yang lebih tinggi, pengembangan pasar modal yang terbatas, dan ○ di negara yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk diselamatkan oleh pemerintah ketika krisis 	<p>Sampel: 1,128 observasi perusahaan-tahun dari 26 negara selama periode 1997 sampai 2001.</p> <p>Teknik analisis: Regresi OLS</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
7	<p><i>Politically connected CEOs, corporate governance, and Post-IPO performance of China's newly partially privatized firms</i></p> <p>Oleh: Joseph P.H. Fan, T.J. Wong, and Tianyu Zhang</p> <p><i>Journal of Financial Economics, 2007</i></p>	<p>Variabel independen: koneksi politik CEO</p> <p>Variabel dependen: <i>post-IPO firm performance</i> (menggunakan <i>Cumulative Market Adjusted Stock Returns</i>, perubahan pada <i>Return on Sales</i>, pertumbuhan penjualan, and pertumbuhan pendapatan)</p> <p>Variabel kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham biasa yang dimiliki pemegang saham terbesar (biasanya pemerintah) 2. <i>Market to book equity ratio</i> 3. <i>Debt to sales ratio</i> 4. <i>Log of total assets</i> 5. <i>Regulated industry dummy variable</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan-perusahaan dengan CEO yang terkoneksi secara politik memiliki dewan yang terdiri dari mantan maupun birokrat pemerintah, yang menunjukkan tingkat profesionalisme dan pengalaman relevan yang rendah. • Kinerja akuntansi dan <i>stock return</i> nya lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik. 	<p>Sampel: 790 perusahaan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) selama tahun 1993-2001 (73% dari total IPO di China selama periode itu) pada Pasar modal Shanghai dan Shenzhen.</p> <p>Teknik analisis: Regresi OLS</p>
8	<p><i>Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia</i></p> <p>Oleh: Simon Johnson and Todd Mitton</p> <p><i>Working Paper 8521 – National Bureau of Economic Research, 2001</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik</p> <p>Variabel dependen: Kinerja perusahaan (<i>dividend-inclusive monthly stock returns</i>)</p> <p>Variable Control:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> 2. Ukuran 3. <i>Book to market ratio</i> 4. Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang memiliki koneksi politik diprediksikan akan kehilangan subsidiya di fase pertama krisis Asia. 	<p>Sampel: 424 perusahaan Malaysia yang terdaftar di Pasar Modal Kuala Lumpur yang datanya tersedia di database Worldscope per October 1999.</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
9	<p><i>Political Connections and Firm Value: Evidence from the Regression Discontinuity Design of Close Gubernatorial Election</i></p> <p>Oleh: Quoc-Anh Do, Yen-Teik Lee, and Bang Dang Nguyen</p> <p><i>Draft Research 2012 SMU-ESSEC Workshop on Financial Economics, the 2012 Cambridge-Penn-Tinbergen Annual Conference on Finance, and the 2012 Asia-Pacific Economic Association Meetings in Singapore</i></p>	<p>Variabel independen: <i>WinLose</i> (koneksi politik, yaitu bernilai 1 jika terkoneksi dengan pemenang pemilu, bernilai 0 jika terkoneksi dengan pihak yang kalah pemilu.</p> <p>Variabel dependen: <i>Cumulative abnormal return (CARs)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi politik lebih bernilai pada perusahaan dengan tingkat peraturan dan korupsi yang lebih tinggi, perusahaan yang lebih kecil, dan perusahaan yang bergantung pada pembiayaan eksternal. • Perusahaan yang terkoneksi dengan pemenang pemilu berinvestasi lebih besar, mendapatkan kinerja operasi yang lebih baik, memiliki lebih banyak kas, dan menikmati kinerja saham jangka panjang yang lebih baik, dibandingkan perusahaan yang terkoneksi dengan pihak yang kalah pemilu. 	<p>Sampel: perusahaan yang terkoneksi yang terdiri dari 63 perusahaan per tahun (secara rata-rata) dengan rentang antara 1 – 263 selama periode tahun 1999-2010 dengan 35 pemilihan wilayah gubernur di U.S.</p> <p>Teknik analisis: Regresi <i>Discontinuity Design</i> (RDD)</p>

BERBAGAI PENELITIAN DI INDONESIA:

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
1	<p><i>Politically Connected Banks: Some Indonesian Evidence</i></p> <p>Oleh: Bambang Sutopo, Irwan Trinugroho, dan Sylviana Maya Damayanti</p> <p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret</p> <p><i>International Journal of Business and Society, Vol. 18 No. 1, 2017, 83-94.</i></p>	<p>Variabel independen: Koneksi politik (1 jika ada, 0 jika tidak ada), dikategorikan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank BUMN 2. Bank swasta yang terkoneksi politik (dikontrol oleh politikus atau memiliki minimal satu komisaris yang direktur yang terkoneksi secara politik sebagai birokrat pemerintahan, atau mantan birokrat, anggota dewan, atau anggota partai politik maupun mantan anggota partai politik. <p>Variabel dependen 1: Kinerja (diukur dengan tingkat pengembalian atas aset (ROA) dan ekuitas (ROE))</p> <p>Variabel dependen 2: Biaya pendanaan (diukur dengan bunga yang dibayarkan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi politik memiliki korelasi positif terhadap kinerja. • Koneksi politik memiliki korelasi negatif terhadap biaya pendanaan. Bank yang memiliki koneksi politik mendapatkan akses biaya pendanaan yang lebih murah. • Koneksi politik lebih tidak bernilai bagi bank asing. 	<p>Sampel: 89 Bank di Indonesia selama tahun 2001-2008 (545 observasi bank-tahun).</p> <p>Teknik analisis: Regresi OLS.</p>

No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
2	<p>Pengaruh Koneksi Politik dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i></p> <p>Oleh: Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo</p> <p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Sebelas Maret</p> <p>Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper. ISSN 2460-0784</p>	<p>Variabel independen 1: Koneksi Politik</p> <p>Variabel independen 2: <i>Corporate Governance</i>, diukur dengan indeksi CG.</p> <p>Variabel dependen: <i>Tax Aggressiveness</i> (diukur dengan <i>Effective Tax Rate</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i>. • <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i>, meskipun tidak signifikan secara statistik. 	<p>Sampel: 175 Perusahaan bukan bank yang terdaftar di BEI antara tahun 2006-2014.</p> <p>Teknik analisis: Regresi berganda.</p>

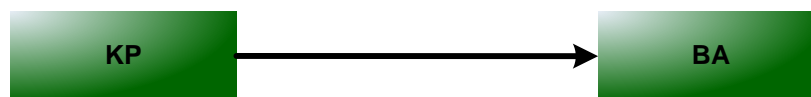
No.	Judul Penelitian	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian
3	<p>Analisis pengaruh hubungan politik dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang dan biaya ekuitas (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)</p> <p>Oleh: Herlinda Amelia</p>	<p>Variabel independen: Hubungan politik Variabel dependen 1: Biaya hutang Variabel dependen 2: Biaya ekuitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang, namun tidak terhadap biaya ekuitas. • Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan biaya ekuitas. 	<p>Sampel: 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2008-2011 dengan total 264 observasi.</p>
4	<p>Koneksi Politik, Manajemen Laba, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak di Indonesia</p> <p>Oleh: Rumiwati</p> <p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2016</p> <p>Tesis</p>	<p>Variabel independen 1: Koneksi politik Variabel independen 2: Manajemen Laba Variabel pemoderasi: Kualitas Audit (keberadaan KAP <i>Big-4</i>) Variabel dependen: Penghindaran Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada hubungan positif secara signifikan antara manajemen laba dan penghindaran pajak • Tidak ditemukan bukti koneksi politik terhadap penghindaran pajak • Kualitas audit tidak dapat dibuktikan dapat memperlemah hubungan koneksi politik dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak perusahaan. 	<p>Sampel: Perusahaan Manufaktur di BEI untuk periode 2010 – 2014.</p>

2.4. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa adanya koneksi politik dapat meningkatkan biaya agensi perusahaan karena menimbulkan kecenderungan manajemen untuk menggunakan koneksi politik ini untuk memberikan manfaat bagi kepentingan pribadi mereka di atas tanggungan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, meningkatkan biaya agensi perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Koneksi politik merupakan prediktor yang positif terhadap biaya agensi perusahaan.



Atau secara matematis:

$$BA = \alpha + \beta KP + \varepsilon$$

Di mana:

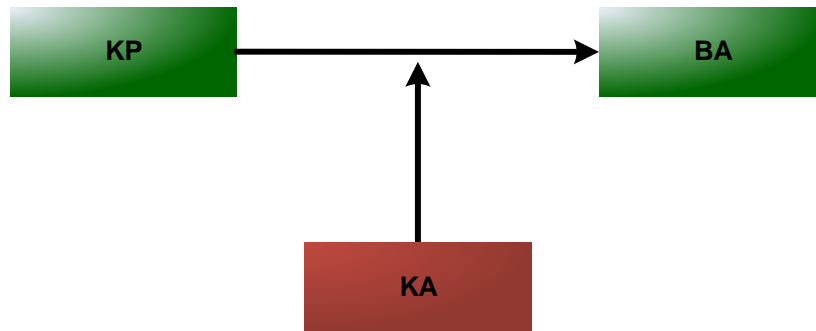
KP: Koneksi Politik

BA: Biaya Agensi

Selanjutnya, berdasar temuan pada penelitian Khan, Mihret, & Muttakin (2016), dapat diketahui bahwa kualitas audit dapat memitigasi pengaruh positif koneksi politik terhadap biaya agensi perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kualitas audit dapat memoderasi pengaruh koneksi politik dan biaya agensi, dimana kehadiran kualitas audit dapat menurunkan pengaruh koneksi politik terhadap biaya agensi.



Atau secara matematis:

$$BA = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 KA + \beta_3 KP \times KA + \varepsilon$$

Di mana:

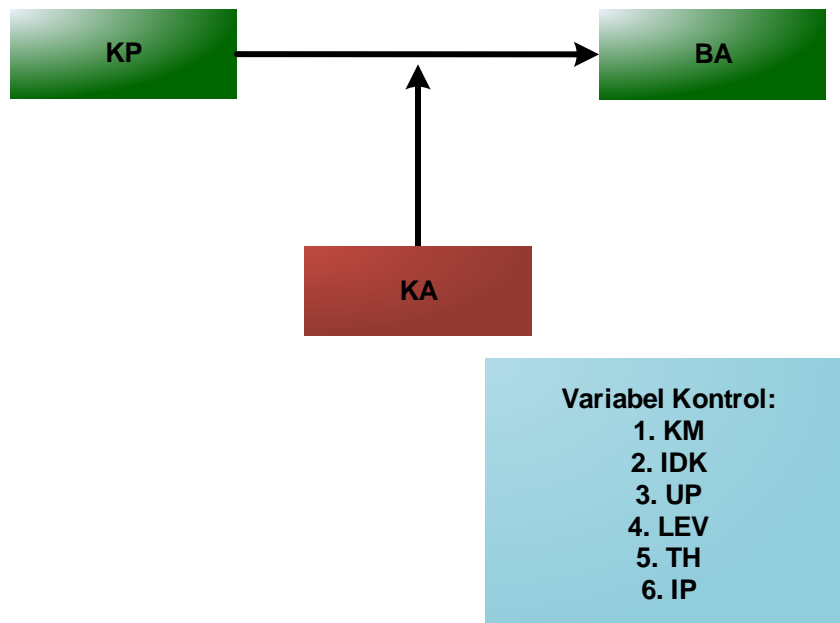
KP: Koneksi Politik

BA: Biaya Agensi

KA: Kualitas Audit

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah koneksi politik. Kualitas audit berperan sebagai variabel pemoderasi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah biaya agensi. Adapun beberapa variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, tahun, dan industri perusahaan.

Dengan demikian secara keseluruhan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Atau secara matematis:

$$BA = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 KA + \beta_3 KP \times KA + \beta_4 KM + \beta_5 IDK + \beta_6 UP + \beta_7 LEV + \beta_8 TH + \beta_9 IP + \varepsilon$$

Di mana:

KP: Koneksi Politik

BA: Biaya Agensi

KA: Kualitas Audit

KM: Kepemilikan Manajerial

IDK: Independensi Dewan Komisaris

UP: Ukuran Perusahaan

LEV: Leverage

TH: Tahun

IP: Industri Perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian konklusif deskriptif. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk mengumpulkan data dan menggambarkan karakteristik perorangan, kejadian, atau suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2013). Penelitian deskriptif dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut Sekaran & Bougie (2013) pada bagian studi deskriptif, terkadang peneliti tertarik pada asosiasi di antara variabel-variabel untuk menggambarkan populasi, kejadian atau situasi. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik suatu kelompok dalam suatu situasi tertentu, berpikir sistematis mengenai aspek-aspek dalam suatu situasi tertentu, menawarkan ide untuk pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, dan membantu membuat keputusan tertentu (Sekaran & Bougie, 2013).

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data koneksi politik, kualitas audit, dan biaya agensi perusahaan pada perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sumber yang digunakan adalah laporan keuangan yang tersedia di laman Bursa Efek Indonesia dan data hasil penelusuran mesin pencari Google. Penelitian ini nantinya dapat membantu peneliti dalam memahami karakteristik pasar modal di Indonesia, membantu berpikir sistematis dalam

menilai dampak adanya koneksi politik pada biaya agensi perusahaan dan bagaimana kualitas audit memoderasi pengaruh tersebut, dan menawarkan ide untuk penelitian lebih lanjut di negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini memenuhi karakteristik desain penelitian deskriptif.

Penelitian akan dilakukan dengan keadaan normal yang tidak di buat-buat. Peneliti tidak akan melakukan intervensi pada jendela pengamatan, sehingga keadaan penelitian ini akan berjenis *Field Study* pada klasifikasi *Noncontrived Settings*. Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi. Observasi meliputi masuk ke dalam keadaan alami orang-orang, memperhatikan apa yang mereka lakukan, dan menggambarkan; menganalisis; dan menginterpretasikan apa yang dilihat seseorang (Sekaran & Bougie, 2013).

3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Hal ini karena perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal cenderung memiliki jumlah pemegang saham yang lebih besar dengan kepemilikan yang lebih rendah sehingga konflik keagenan yang muncul lebih besar. Selain itu, dari sisi ketersediaan data, informasi keuangan dan terkait dari perusahaan-perusahaan terbuka dipublikasikan secara umum di website pasar modal dimana laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Hal ini meningkatkan tingkat keyakinan atas informasi keuangan yang tertulis di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut.

Maka, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal di Indonesia. Adapun jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia pada saat penelitian ini dilakukan adalah berjumlah 568 perusahaan. Daftar seluruh perusahaan terbuka di Indonesia dapat di lihat pada Lampiran 1 dari penelitian ini.

Dengan demikian, kerangka sampel pada penelitian ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang tercatat di website Bursa Efek Indonesia. Semua perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar industri, yaitu Industri Utama; Industri Manufaktur; dan Industri Jasa. Lebih lanjut, pembagian dilakukan menjadi 9 Sektor Bursa Efek Indonesia: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, Sektor Industri Barang Konsumsi, Sektor Properti, Real Estat dan Konstruksi Bangunan, Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, Sektor Keuangan, dan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (Sektor BEI , 2014).

Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *probability sampling* yaitu *proportionate stratified random sampling*. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan di pasar modal Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 9 Sektor. Pemilihan sampel akan dilakukan secara acak dari hanya delapan sektor secara proporsional. Sektor yang tidak akan diteliti pada penelitian ini adalah sektor keuangan

karena sektor ini diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan peraturan yang berbeda dibandingkan dengan 8 sektor lainnya. Terdapat 93 perusahaan terbuka yang termasuk dalam sektor keuangan yang tidak menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat juga 50 perusahaan yang tidak dipilih sebagai sampel karena merupakan perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Perusahaan yang baru berdiri tidak dipilih sebagai sampel karena kinerja keuangan yang terefleksi di laporan keuangan yang di observasi belum menggambarkan kinerja keuangan setahun penuh.

Jumlah sampel yang akan diambil dilakukan dengan panduan jumlah sampel yang dianjurkan oleh Krejcie dan Morgan (1970) dalam Sekaran dan Bougie (2013). Pada populasi yang berjumlah 550, jumlah sampel yang digunakan adalah 225. Sedangkan pada populasi yang berjumlah 600, jumlah sampel yang digunakan adalah 234. Penelitian ini memiliki populasi 568 perusahaan sehingga jumlah sampel yang akan diteliti akan merujuk pada panduan untuk jumlah sampel yang lebih besar, yaitu 234 perusahaan. Observasi akan dilakukan pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 dan 2017 karena ketersediaan data laporan keuangan yang dapat diakses di laman Bursa Efek Indonesia hanya 2 tahun terakhir. Dengan demikian, jumlah observasi perusahaan-tahun adalah sebanyak 468 observasi.

Pemilihan perusahaan yang menjadi sampel dari masing-masing sektor akan dilakukan secara acak dan proporsional. Proporsi jumlah sampel terhadap kedelapan sektor yang akan diteliti (sebanyak 425 perusahaan) adalah 55%. Dengan demikian, dari setiap sektor akan dipilih jumlah sampel

sebanyak 55% secara acak. Berikut ini adalah jumlah perusahaan yang dipilih sebagai sampel dari setiap sektor industri pada penelitian ini:

No.	Sektor Industri	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Pertanian	21	12
2	Pertambangan	38	21
3	Industri Dasar dan Kimia	63	35
4	Aneka Industri	41	23
5	Industri Barang Konsumsi	38	21
6	Properti	56	31
7	Infrastruktur	53	29
8	Perdagangan, Jasa dan Investasi	115	62
		425	234
	Tidak dipilih sebagai sampel karena:		
	a. Sektor Keuangan	93	
	b. Perusahaan Baru	50	
	Jumlah	568	

Pada metode pemilihan sampel dengan *proportionate stratified random sampling* ini, setelah menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari setiap industri, penulis mengurutkan daftar 425 perusahaan yang akan dipilih sesuai sektor industrinya dan kemudian sesuai abjad kode perusahaan. Setelah itu, perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan yang berada pada urutan angka ganjil dari daftar tersebut, yaitu perusahaan dengan nomor urut 1, 3, 5, dan seterusnya. Namun demikian, setiap perusahaan yang bertuliskan Persero (merekpresentasikan BUMN) secara sengaja dimasukkan sebagai sampel karena jumlahnya yang sedikit untuk dapat merepresentasikan perusahaan yang memiliki koneksi politik. Daftar perusahaan yang terpilih secara acak dapat dilihat pada Lampiran 2 dari penelitian ini.

3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen

3.3.1. Variabel Koneksi Politik

Variabel koneksi politik akan diproksikan sesuai dengan definisi yang diungkapkan Faccio (2006) dan Pranoto dan Widagdo (2016). Sebuah perusahaan akan dianggap memiliki koneksi politik (nilai dummy variabel koneksi politik = 1) jika salah satu dari kriteria di bawah ini terpenuhi:

- a. Salah satu pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 10% adalah:
 - a1. Menteri, atau
 - a2. Kepala daerah, atau
 - a3. Memiliki kedekatan dengan politikus ternama, atau
 - a4. Memiliki kedekatan dengan partai politik ternama, atau
 - a5. Merupakan bagian dari parlemen.
- b. Salah satu direktur utama perusahaan adalah:
 - b1. Menteri, atau
 - b2. Kepala daerah, atau
 - b3. Memiliki kedekatan dengan politikus ternama, atau
 - b4. Memiliki kedekatan dengan partai politik ternama, atau
 - b5. Merupakan bagian dari parlemen.
- c. Merupakan perusahaan yang berbentuk BUMN.

3.3.2. Variabel Biaya Agensi

Sejalan dengan penelitian Ang, Cole, & Lin (2000), variabel biaya agensi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini akan diukur dengan dua alternatif pengukuran, yaitu:

- a. Rasio Pemanfaatan Aset (*Asset Utilisation Ratio* / AUR), dan
- b. Rasio Biaya (*Expense Ratio* / ER).

Alternatif pertama adalah Rasio Pemanfaatan Aset (AUR). Rasio Pemanfaatan Aset (AUR) atau sering disebut juga *Asset Turnover* adalah rasio antara nilai penjualan setahun dengan total aset perusahaan. AUR menggambarkan efisiensi penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba (Ang, Cole, & Lin, 2000). Nilai AUR yang rendah menunjukkan biaya agensi yang lebih tinggi yang dikarenakan manager menikmati keuntungan, membeli aset yang tidak produktif sehingga menimbulkan keputusan investasi yang buruk (Khan, Mihret, & Muttakin, 2016).

Alternatif kedua adalah Rasio Biaya (ER). Rasio Biaya, yang juga dikenal sebagai proxi langsung biaya agensi, adalah rasio dari biaya operasional terhadap total penjualan setahun (Ang, Cole, & Lin, 2000). Biaya operasional terdiri dari biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, tidak termasuk biaya pendanaan dan biaya-biaya tidak teratur seperti rugi penjualan aset. ER mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengontrol biaya operasional (Khan, Mihret, & Muttakin, 2016), termasuk konsumsi berlebihan dan biaya agensi

langsung lainnya (Ang, Cole, & Lin, 2000). Rasio biaya yang besar menunjukkan proxi biaya agensi yang besar.

3.3.3. Variabel Kualitas Audit

Akrual diskresioner diukur dengan model Jones Modifikasian sebagaimana digunakan pada penelitian Elshafie & Nyadroh (2014), Balsam, Krishnan, & Yang (2003), dan Krishnan (2003) sebagai berikut:

$$\frac{ACCR_{j,t}}{TA_{j,t-1}} = \alpha_1 \frac{1}{TA_{j,t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_{j,t}}{TA_{j,t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_{j,t}}{TA_{j,t-1}} + e_{j,t}$$

dimana ACCR adalah akrual diskresioner; TA adalah total aset; ΔREV adalah perubahan penjualan (atau pendapatan), yang diukur dengan selisih nilai penjualan tahun ini dengan nilai penjualan tahun sebelumnya; PPE adalah nilai bruto aset tetap; j adalah kode untuk perusahaan yang diuji; t adalah tahun pengujian; dan t-1 adalah satu tahun sebelum tahun yang diuji.

3.3.4. Instrumen Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan instrumen khusus seperti kuesioner dalam tahapan pengumpulan data. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan pada penelitian ini telah terpublikasi di internet, yaitu dapat diakses di laman Bursa Efek Indonesia. Penulis hanya perlu mengumpulkan data-data tersebut dari laporan keuangan perusahaan yang

telah ada dan dipublikasikan dan kemudian mengolahnya menjadi data yang dapat dianalisis dengan program statistik.

Untuk itu, penulis akan menggunakan kertas kerja dalam mengumpulkan data dari laporan keuangan yang dipublikasikan di laman Bursa Efek Indonesia dan hasil penelusuran mesin pencari Google. Kertas kerja tersebut akan mempermudah peneliti dalam mengkonversi angka-angka yang didapat dari laporan keuangan dan hasil penelusuran mesin pencari Google menjadi data variabel yang akan diteliti pada penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dengan persamaan matematis pada penjelasan sebelumnya.

3.4. Analisis Data

3.4.1. Alat Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan uji regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dirujuk pada penelitian ini, yaitu penelitian Khan, Mihret, & Muttakin (2016). Dalam menjalankan estimasi model dengan uji regresi OLS, terdapat hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu asumsi-asumsi OLS yang harus dipenuhi (asumsi klasik). Jika asumsi-asumsi klasik tersebut tidak dipenuhi, maka parameter yang dihasilkan tidak akan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Asumsi BLUE adalah sebagai berikut:

- a. Model regresi adalah linier dalam parameter

- b. Error term berdistribusi normal, sehingga nilai rata-rata error (atau *expected error*) adalah nol
- c. Memiliki varians yang tetap (homoskedastisitas)
- d. Tidak ada hubungan antara variabel bebas dan error term
- e. Tidak ada korelasi serial antara error (tidak ada autokorelasi)
- f. Pada regresi linear berganda, hubungan antarvariabel bebas tidak terjadi

3.4.2. Analisis Data

3.4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum setiap variabel dalam penelitian ini. Variabel-variabel dalam penelitian ini bersifat nominal (yaitu variabel koneksi politik) dan real (yaitu variabel kualitas audit dan biaya agensi). Oleh karena itu, terhadap data nominal analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tabel frekuensi. Sedangkan pada data real, data disajikan dalam ukuran nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maximum*), rata-rata (*mean*), deviasi standar (*standard deviation*), dan varians (*variance*).

3.4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan regresi OLS harus memenuhi uji asumsi klasik untuk dapat memenuhi kriteria BLUE. Dengan demikian, terhadap data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dilakukan

uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas Data, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedasitas, dan Uji Linearitas.

3.4.2.2.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Jika asumsi ini tidak dipenuhi atau dilanggar, maka akan berdampak pada hasil uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Menurut Ghozali (2011), pada analisis grafik, secara prinsip, suatu data yang memenuhi asumsi normalitas akan menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Jika tidak, maka data yang digunakan tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan analisis grafik sebaiknya didukung oleh uji statistik untuk menghindari penyesatan karena analisis yang dilakukan secara visual dapat saja kelihatan normal, padahal mungkin sesungguhnya tidak. Uji normalitas secara statistik akan dilakukan dengan Uji Nonparametrik *One-sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika signifikansi jauh dibawah 0.05, maka berarti variabel tidak terdistribusi secara normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka akan dilakukan transformasi data.

3.4.2.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara error pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Masalah autokorelasi umumnya muncul pada penelitian dengan data *time-series* karena gangguan pada suatu periode biasanya mempengaruhi gangguan pada periode berikutnya (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan data *crosssection* sehingga masalah autokorelasi seharusnya tidak muncul pada penelitian ini.

3.4.2.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan secara linier antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah tiga hal yang menunjukkan adanya multikolinieritas dalam model regresi menurut Ghozali (2011):

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90),
3. Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih besar atau sama dengan 10.

3.4.2.2.4. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Suatu model regresi yang baik adalah yang varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, atau disebut dengan kondisi homoskedasitas. Menurut Ghozali (2011), kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedasitas karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Penelitian ini menggunakan data *crosssection*, sehingga uji asumsi heteroskedasitas akan dilakukan dengan uji Park dan uji Glejser. Pada uji Park, jika parameter beta dari persamaan regresi yang meregresikan logaritma dari kuadrat nilai residual sebagai variabel dependen signifikan secara statistik, maka terdapat indikasi heteroskedasitas. Pada uji Glejser, jika parameter beta dari persamaan regresi yang meregresikan absolut residual sebagai variabel dependen signifikan secara statistik, maka terdapat indikasi heteroskedasitas. Bilamana terdapat indikasi heteroskedasitas, maka akan dilakukan transformasi variabel untuk mengatasinya.

3.4.2.2.5. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah spesifikasi model yang digunakan telah benar, yaitu apakah fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linear, kuadratik, atau kubik. Uji linearitas akan diuji dengan Uji *Lagrange Multiplier*.